

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI MALAYSIA TINJAUAN HISTORIS

Salman

Universitas Muhammadiyah Riau

Email : salman@umri.ac.id

ABSTRACT

Education plays a key role in realising Malaysia's aspirations to be a developed nation. Malaysia's achievement in education enrolment is significant. This is because the policies given in the education stage are very much considered. This policy emerged after independence in 1957. The policy towards Islamic education was included in national legislation. So that schools that were originally funded by the guardians of students, after the education law was issued, the state began to disburse development costs. Among the important things of this law is equal distribution of competent teachers in their fields.

Keyword : *Analysis, Policy, Islamic Education*

ABSTRAK

Pendidikan memainkan peran dalam mewujudkan cita-cita Malaysia untuk menjadi bangsa yang maju. Pencapaian Malaysia dalam daftar pendidikan sangat signifikan. Hal ini dikarenakan kebijakan-kebijakan yang diberikan dalam tahapan pendidikan sangat diperhatikan. Kebijakan itu muncul setelah merdeka pada tahun 1957. Kebijakan terhadap pendidikan islam masuk kedalam perundang-undangan nasional. Sehingga sekolah-sekolah yang semula dibiayai oleh wali murid, setelah ada undang-undang pendidikan tersebut maka biaya pembangunan mulai dikurcurkan negara. Diantara hal penting dari undang-undang itu adalah adanya pemerataan terhadap pengajar-pengajar yang berkompeten dalam bidangnya.

Kata kunci : *Analisis, Kebijakan, Pendidikan Islam*

A. PENDAHULUAN

Kebijakan diartikan sebagai acuan yang akan dilaksanakan dalam sebuah pemerintahan atau swasta dalam mengambil langkah akan ditempuh dalam sebuah masalah yang sedang dihadapi, supaya tercapainya cita-cita, tujuan dan prinsip untuk mencapai sasaran yang akan dilaksanakan. Anderson (dalam Budi Winarno, 2004: 19-20), menjelaskan sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami menjadi beberapa kategori seperti tuntutan kebijakan (policy demands) artinya adalah tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh aktor-aktor

swasta atau pemerintah, ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik.

Tuntutan-tuntutan tersebut berupa desakan agar pejabat-pejabat pemerintah mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan mengenai suatu masalah tertentu. Biasanya tuntutan-tuntutan ini diajukan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat dan mungkin berkisar antara desakan secara umum bahwa pemerintah harus “berbuat sesuatu” sampai usulan agar pemerintah mengambil tindakan tertentu mengenai suatu persoalan. Jika kita lihat kembali kebijakan-kebijakan pendidikan islam yang diberikan kepada rakyat Malaysia dahulu sesungguhnya mereka memperoleh pendidikan yang sangat jauh ketertinggalan dari negara-negara islam lainnya pada masa sebelum kemerdekaan. Hal itu dilihat dari banyaknya pelajar-pelajar Malaysia menuntut ilmu agama kenegara-negara islam yang memiliki sekolah-sekolah berbasis agama. Contoh kecil adalah pada awal-awal kemerdekaan Malaysia lebih banyak mengirim siswa-siswinya menuntut ilmu ke padang panjang. Hal itu merupakan contoh kecil agar para siswa mampu menerapkan ilmu-ilmu agama pada setiap jenjang pendidikan yang akan diajarkan di negeri mereka.

B. METODE PENELITIAN

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

Dalam penelitian kepustakaan (*library research*) ini, sumber data yang merupakan bahan tertulis terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diambil dari Jurnal Internasional. Adapun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat online. Dengan kata lain, data sekunder adalah data pendukung dari data

utama atau data primer. Data sekunder dari penelitian ini diambil dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dll.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis). Analisis konten biasanya menggunakan kajian kualitatif dengan ranah konseptual. Mula-mula kata-kata dikumpulkan kedalam elemen referensi yang telah umum sehingga mudah membangun konsep. Konsep tersebut diharapkan mawadahi isi atau pesan karya secara komprehensif. Nana Syaodih menerangkan bahwa teknik analisis isi ditujukan untuk menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen resmi, dokumen yang validitas dan keabsahannya terjamin, baik dokumen perundangan dan kebijakan maupun hasil-hasil penelitian. Analisis juga dapat dilakukan terhadap buku-buku teks, baik yang bersifat teoritis maupun empiris. Adapun alur yang digunakan dalam analisa data yaitu : reduksi daat, display data dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Kemerdekaan Malaysia

Islam adalah agama yang dianut oleh raja-raja melayu pada masa sebelum Malaysia menjadi sebuah negara federasi. Pada tahun 1400 Masehi, kesultanan malaka memiliki kekuasaan yang amat luas meliputi semenanjung sampai kepada pantai timur sumatera, sehingga jejak yang diketahui bahwasanya posisi kerajaan maleyu malaka sanga strategis dan dapat dijadikan sebagai pusat perdagangan rempah-rempah pada masa itu.¹ Malaysia sendiri pernah dijajah oleh tiga pasukan yaitu portugis (1511),belanda (1641), inggris (1824-1957).² Setelah mencapai kemerdekaan dari penjajah inggris, Malaya bergabung dengan kerajaan lainnya seperti sabah dan Sarawak membentuk sebuah negara yang disebut dengan Malaysia.³ Dalam perkembangan politik dan system pemerintahan Malaysia paling tidak terdapat tiga periode yang akan dikupas pada makalah ini; *Pertama* penjajahan Inggris, *Kedua* Detik-detik Kemerdekaan, *Ketiga* Malaysia setelah merdeka.

Pertama Penjajahan Inggris, Ketika penjajahan Inggris, Malaya dijajah oleh Inggris terpisah yaitu negeri-negeri selat (NNS), Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (NNMB), Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu (NNMTB). Bentuk pemerintahan tiga

¹ Amir F. Hidayat, dan Abdurrasyid, *Ensiklopedi Negara-negara di Dunia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), cet. 1. h. 310.

² *Times Book International, Malaysia*, (Singapore & Kuala Lumpur : TBI, 2002), cet. 1, h. 5

³ Ajid Thorir, *Studi Kawasan Dunia Islam, Perspektif Etno-Linguistik dan GeoPolitik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),cet. 1, h. 337.

negara berlawanan itu diketuai oleh seorang Pejabat Tinggi Inggris. Dalam menjalankan pemerintahan di Malaya, Inggris telah memperkenalkan berbagai sistem politik. Pada awalnya, Inggris memperkenalkan suatu sistem yang dinamakan Sistem Residen. Sistem ini awalnya diperkenalkan setelah terjadinya Perjanjian Pengkor. Sistem ini berbentuk birokrasi dan dijalankan oleh seorang Residen Inggris. Sistem ini mempunyai kekuasaan tertinggi yang mencakup urusan pemerintahan, ekonomi, dan undang-undang di Malaya.⁴

Perkembangan gerakan politik Malaya terjadi pada akhir tahun 30-an dengan lahirnya semangat nasionalisme di kalangan kaum elit Melayu yang berpendidikan tinggi dan dipengaruhi gerakan nasionalis Indonesia. Organisasi pertama yang didirikan berdasarkan nasionalis Melayu dan mempunyai kepentingan politik adalah Kekuasaan Melayu Muda (KKM). KKM membawa konsep anti penjajah untuk memperjuangkan kemerdekaan negara dan ingin mewujudkan penyatuan dengan Indonesia melalui Indonesia Raya. Inggris telah mengkhawatirkan gerakan KKM sehingga pada tahun 1941 sejumlah besar pimpinan KKM telah ditangkap dan dipenjara. Ketika penjajah Jepang pimpinan KKM telah dibebaskan, akan tetapi Jepang tetap menghalang dan membubarkan organisasi ini. Setelah pembubaran KKM, lahir pula beberapa organisasi lain yang bertujuan menjatuhkan penjajah Jepang, yaitu *Malaya Peoples Anti Japan Army* (MPAJA) dan Partai Komunis Malaya (PKM).⁵

Penjajahan Jepang telah berakhir, ketika Nagasaki dan Hiroshima dimusnahkan oleh tentara sekutu pada tanggal 6 Agustus 1945. Setelah ditimpa kekalahan, Jepang telah menyerahkan kembali Malaya kepada Inggris pada 15 Agustus 1945. Kekalahan Jepang telah memberi ruang kepada Parti Komunis Malaya (PKM) untuk menguasai Malaya. PKM telah bertindak kejam terhadap penduduk Malaya dengan membunuh dan memusnahkan harta benda mereka. Pada waktu itu, Inggris kembali menjajah Malaya dan mengumumkan keadaan darurat di Malaya sekitar tahun 1948 hingga 1960.⁶ Sekembalinya Inggris di Malaya, Inggris memperkenalkan sistem pemerintahan baru yang dinamakan Kesatuan Malaya atau *Malayan Union*. Walaupun Inggris mendapat dukungan dari Raja-raja Malayu, namun keabsahan Kesatuan Malaya bernilai rendah karena disertai bersama tantangan dan ancaman dari masyarakat. Menjelang abad ke-20, gerakan kesadaran dan semangat nasionalisme dikalangan masyarakat Melayu semakin

⁴ *International Law Book Services, Malaysia Kita*, (Kuala Lumpur: Direct Art Company, 2005), cet. 6, h. 197.

⁵ *Ibid*, h. 97

⁶ Amir F. Hidayat, dan Abdurrasyid, *Ensiklopedi Negara-Negara Di Dunia*, h. 311

membara. Masyarakat Melayu awalnya menentang Kesatuan Malaya dengan mendirikan suatu organisasi politik melalui Kongres Melayu Semala pada 11 Mei 1946 di Johor.

Organisasi itu dinamakan United Malay National Organization (UMNO), dan diketuai oleh Dato' Onn Ja'far. Organisasi ini menentang keras Kesatuan Malaya, karena dalam Kesatuan Malaya status kewarganegaraan akan diberikan sama rata kepada semua warga asing yang lahir di Malaya. Penguasa Inggris juga ingin menghapuskan kekuasaan sultan dan sultan hanya akan diberi otoritas dalam hal keagamaan dan adat istiadat Melayu. Motif penentang lain adalah karena muncul kekhawatiran dikalangan orang Melayu terhadap para imigran, terutama golongan Cina yang ingin menguasai perekonomian Malaya.⁷

Kedua Detik-detik Kemerdekaan, Akibat tantangan dari masyarakat Melayu, Kesatuan Malaya telah dibubarkan pada 21 Januari 1948, dan penguasa Inggris setuju untuk melakukan perundingan bersama pimpinan UMNO dalam rangka membuat draf bagi membentuk perlembagaan baru dan sistem pemerintahan baru di Malaya. Hasilnya, penguasa Inggris setuju untuk mendirikan Persekutuan Malaya dan membentuk perlembagaan baru yang dinamakan Perjanjian Persekutuan Malaya 1948. Perjanjian ini menetapkan bahwa dalam pemerintah Persekutuan Malaya harus terdapat Pejabat Tinggi Inggris, satu Dewan Perundangan Persekutuan yang beranggotakan 75 anggota, satu dewan Masyarakat Pemerintah, dan satu Dewan Raja-raja untuk menasehati Pejabat Tinggi Inggris.⁸

Partai politik Malaya semakin berkembang dengan terbentuknya Partai Gabungan yang mewakili etnis-etnis di Malaya. Partai ini diketuai oleh Tunku Abdul Rahman yang juga menjabat sebagai ketua UMNO. Partai Gabungan didirikan pada bulan Januari 1952 dan disertai oleh tiga partai besar, yaitu Partai Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO), Partai Persatuan Cina Malaya (MCA), dan Pertubuhan Kongres India Malaya (MIC). Pada tanggal 27 Juli 1955, partai ini memenangi pemilihan umum pertama dengan memenangi 51 kursi dari 52 kursi yang dipertandingkan.⁹ Pada waktu inilah awal sistem demokrasi di Malaya. Sistem ini diwujudkan sebagai persiapan ke arah pembentukan kerajaan berparlemen. Sistem ini juga diperkenalkan untuk member latihan kepada rakyat dan memberi pengalaman pemilihan umum di Malaya. 20 berparlemen. Sistem ini juga diperkenalkan untuk member latihan kepada rakyat dan memberi

⁷ Alfitra Salamm dan Achmad Syahid, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, h. 415

⁸ Muhammad Ismail Ahmad, *Sejarah Malaysia*, (Selangor: Pustaka Mawar, 2004), cet. 1. h

⁹ Times Book International, *Malaysia*, h. 13.

pengalaman pemilihan umum di Malaya. Dengan kemenangan yang telah dicapai, pada bulan Januari 1956 Tunku bersama wakil Partai Gabungan dan wakil raja-raja berangkat ke London untuk melakukan perundingan kemerdekaan dengan penguasa Inggris.

Hasil perundingan itu, tanggal kemerdekaan Malaya telah ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 1957. Setelah selesai perundingan, suatu komisi dibentuk dan dinamakan Komisi/Suruhanjaya Reid. Komisi itu bertujuan untuk membentuk konstitusi baru bagi Malaya.¹⁰ Politik Malaya terus berkembang, dalam rangka membentuk sebuah negara yang dinamakan Malaysia. Tunku berencana untuk menggabungkan Malaya, Singapura, Sabah, Serawak, dan Brunei dalam sebuah negara. Dalam pembentukan ini, berlaku perbincangan panjang di antara Komisi Cobbold, Anggota Perundingan Persekutuan, Anggota Pemerintah, dan Anggota Referendum Singapura. Setelah berlaku beberapa perbincangan, Persekutuan Malaysia hanya meliputi Malaya, Sabah, Serawak, dan Singapura. Dua tahun kemudian, pada tanggal 16 September 1963 Singapura mengundurkan diri dari Malaysia.¹¹ Pada saat ini, Malaysia hanya terdiri dari Sabah, Serawak, dalam Semenanjung Malaysia.

Ketiga Malaysia setelah merdeka, Penjajahan Inggris telah memberi bekas dan perubahan yang jelas dalam sistem politik dan pemerintahan Malaysia. Pada saat ini, Malaysia menggunakan sistem pemisahan kekuasaan dan sistem federalisme yaitu memisahkan antara pemerintahan propinsi dan pemerintahan persekutuan. Majelis Raja-raja merupakan lembaga tertinggi negara yang terdiri dari sembilan orang raja dan empat orang gubernur. Lembaga ini mempunyai kekuasaan dalam melantik Yang di-Pertuan Agung. Konstitusi Malaysia menetapkan bahwa Yang di-Pertuan Agung adalah Kepala Negara, dan ia dipilih dari kalangan raja-raja dalam jangka waktu lima tahun secara bergantian. Yang di-Pertuan Agung berwenang dalam pelantikan Perdana Menteri, merupakan ketua dari tiga cabang pemerintahan, dan merupakan ketua pasukan militer. Yang di-Pertuan Agung juga mempunyai kekuasaan dalam mempersetujui rancangan

¹⁰ Yusuf Harun. *Tunku Idealisme Dalam Kenangan*, (Pulau Pinang: Yayasan Bumiputra, 1991), cet. 1, h. 193.

¹¹ Ahmad Athori Hussain, *Dimensi Politik Melayu 1980-1990, Antara Kepentingan dan Wawasan Bangsa*, (Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993), cet. 1, h. 4

undang-undang. Akan tetapi Yang di-Pertuan Agung tidak terlibat dalam membentuk dasar negara.¹²

Sistem pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Malaysia berkedudukan dibawah Majelis Raja-Raja dan Yang di-Pertuan Agung. Dalam klasifikasi badan eksekutif, Malaysia menggunakan sistem Parleментар, yaitu partai politik yang memperoleh mayoritas kursi di Parlemen akan diangkat sebagai Perdana Menteri dengan persetujuan Yang di-Pertuan Agung. Perdana Menteri berfungsi sebagai ketua pemerintahan, juga sebagai kepanjangan tangan dari parlemen untuk menjalankan kebijakan dan keputusan politik di parlemen.¹³

Legislatif nasional atau parlemen dalam pemerintahan federal menggunakan sistem majilis/departemen, yaitu dewan negara (Senat) dan dewan rakyat (Departemen Kerakyatan). Kedua dewan ini berwenang dalam membuat dan membatalkan undang-undang, berwenang dalam menetapkan cukai baru, dan berwenang dalam meluluskan penggunaan dana negara. Adapun Badan Yudikatif di Malaysia dibagi kepada tiga bagian, yaitu Mahkamah Atasan (Mahkamah Agung, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi), Mahkamah Rendah (Mahkamah Sesyen, Mahkamah Juvana, Mahkamah Magistret, Mahkamah Penghulu), dan Mahkamah Khas (Mahkamah Tentara, Mahkamah Buruh, Mahkamah Khas Raja. Peradilan ini dikuasai oleh kerajaan persekutuan, adapun kerajaan negeri hanya berwenang dalam Mahkamah Syariah dan Mahkamah Adat.¹⁴

Malaysia telah menggunakan bentuk pemerintahan demokrasi sejak mencapai kemerdekaan. Konsep demokrasi adalah konsep yang menggunakan suara rakyat dalam menentukan pimpinan negara. Demokrasi yang diterapkan di Malaysia bercorak demokrasi berparlemen, di mana wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat akan menduduki Parlemen dan menjalankan pemerintahan melalui peruntukan Konstitusi Malaysia.¹⁵ Konstitusi juga masih mengedepankan hal-hal penting dalam perlembagaan seperti hak asasi manusia, hak istimewa orang Melayu, kedudukan agama Islam dan bahasa Melayu.¹⁶ Semenjak mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, Malaysia tetap menggunakan sistem kepartaian berbentuk multi partai hingga saat ini. Jika satu partai memperoleh mayoritas kursi di Parlemen atau Dewan Rakyat, maka partai itu dapat

¹² Ajid Thohir, *Studi Kawasan Dunia Islam, Perspektif Etno-Lingustik dan Geopolitik*, h. 343.

¹³ Hasnah Hussin, dan Nordin Mardiani, *Pengajian Malaysia*, h. 92.

¹⁴ *Ibid*, h.104

¹⁵ Ghazali Mayudin, *Politik Malaysia: Perspektif, Teori, dan Praktik*, (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2002), cet. 1, h. 25.

¹⁶ *Times Book International, Malaysia*, h. 16.

menguasai tampuk pemerintahan Malaysia. Sistem pemilihan umum yang digunakan di Malaysia adalah berasaskan “*First-Past-The-Post-System*” atau sistem distrik, yaitu calon-calon yang memperoleh mayoritas suara disuatu kawasan pemilihan umum, maka calon itu akan berkuasa dikawasan itu.

Pelaksanaan Pemilihan Umum di Malaysia diadakan 5 tahun sekali, yang diawasi oleh suatu komisi yang dinamakan Komisi/Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR). Selain sistem pemerintahan khilafah dan imamah, terdapat sistem pemerintahan lain yang dipraktikan oleh umat Islam dalam konteks negara-bangsa (*nation-state*). Di zaman sekarang, beberapa negara yang mayoritas penduduknya Muslim menganut sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahan. Walaupun menggunakan sistem demokrasi, pengaruh Islam masih begitu nampak dengan banyak perundang-undangan yang berbasis pada syariat Islam.¹⁷

Adapun di Malaysia, sistem demokrasi yang dijalankan merupakan satu langkah untuk merealisasikan cita-cita dalam rangka mewujudkan sebuah negara yang mempunyai suasana politik yang damai dan stabil.

2. Analisis Kebijakan Pendidikan Islam

Sejarah pendidikan Islam di Malaysia dimulai sejak abad 13 ketika Islam pertama kali masuk ke wilayah ini. Islam pendidikan dapat dibagi menjadi empat tahap:

- a. Berpusat di sekitar rumah guru
- b. Berpusat di sekitar masjid, suraus dan madrasah
- c. Berpusat di sekitar lembaga keagamaan yang disebut 'Pondok'. (secara harfiah, Sekolah pondok)
- d. Berpusat di sekitar lembaga keagamaan yang disebut sekolah 'Madrasah'

Pada tahap awal dilakukan dengan cara yang sangat informal dan berpusat di sekitar rumah guru (rumah-rumah guru). Siswa mendatangi rumah guru untuk belajar membaca Alquran dan fardhu Ain (ajaran Islam dasar). Dikarenakan semakin banyaknya siswa yang berbondong-bondong ke tempat guru yang kemudian tidak bisa menampung semuanya, muncullah ide religius pendidikan dipusatkan di sekitar masjid, surau dan madrasah. Guru duduk dengan siswa mereka dalam satu lingkaran. Peran para guru /

¹⁷ International Law Book Services, Malaysia Kita., h. 181.

ulama 'ini tidak hanya sebagai guru tetapi juga bertindak sebagai penasihat bagi penduduk desa keluarga dan komunitas.

Guru / ulama ini dengan mudah diterima masyarakat bahkan kadang-kadang mereka dipanggil ke istana untuk mengajar raja negara dan kerabat mereka. Setelah lulus, para siswa ini juga akan kembali ke tanah air melanjutkan studi ke negara Timur Tengah atau sering membuka sendiri lingkaran belajar / halaqah. Mereka juga membentuk mata rantai di antara satu rantai ulama 'dan lainnya.

Pendidikan Islam di Malaysia tidak dapat dipastikan secara tepat kapan dimulai, tetapi perkara ini dapat dilihat pada latar belakang sejarah kedatangan agama Islam di negara ini dan aktivitas serta kegiatan pendidikan yang berjalan pada waktu tersebut. Kedatangan Islam dan proses islamisasi berlangsung melalui jalur perdagangan atas peranan para pedagang muslim dan mubalig dari Arab dan Gujarat, para dai setempat dan penguasa Islam.¹⁸ Sejak merdeka tahun 1957, ilmu pengetahuan agama Islam telah dijadikan sebagai kurikulum pendidikan nasional Malaysia dan diberikan selama 120 menit per minggunya. Akan tetapi, pemerintah tidak melakukan penekanan atau lulus ujian ilmu pengetahuan agama Islam, sehingga pelajaran ini tidak mendapat perhatian serius dari siswa pada masa tersebut.¹⁹

Sejak tahun 1980-an, Perkembangan masjid dan surau di Malaysia mencerminkan semaraknya aktivitas umat Islam. Misalnya, Bandar Baru Bangi merupakan daerah yang memiliki masjid dan surau dengan perkembangan yang sangat pesat. Masjid-masjid tersebut, bukan saja untuk melaksanakan shalat, melainkan juga digunakan sebagai lembaga pendidikan Islam. Surau an-Nur di Bandar Baru Bangi misalnya, merupakan tempat kajian al-Qur'an dan tafsir baik laki-laki maupun perempuan, terkadang diadakan tahlil serta perbincangan keagamaan yang terjadwal secara sistematis tentang segala hal yang berkaitan dengan masalah spiritual dan problem masyarakat masa kini.²⁰

Ketika Jepang menaklukkan Malaysia (1941-45) dan dikalahkan oleh Inggris pada tahun 1946. Inggris kemudian membuat beberapa reformasi pendidikan yang dimulai dengan Barnes Report (1950) dan Fern Wu Report (1951). Singkatnya, Laporan Barnes menyatakan Minimnya pelajaran agama di sekolah menyebabkan orang tua Melayu mengirimkannya anak-anak belajar agama di sesi sore yang sangat melelahkan. Laporan

¹⁸ Abdul Rahman Haji Abdullah, *Pemikiran Islam di Malaysia: Sejarah dan Aliran*(Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 14.

¹⁹ Qasim A. Ibrahim dan Muhammad A. Saleh, *Buku Pintar Sejarah Islam: Jejak Langkah Peradaban Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*,Cet. II; Jakarta: Zaman, 2014, h. 1057.

²⁰ Dewan Redaksi *Ensiklopedia Islam*,*Ensiklopedia Islam Jilid III*, h. 139.

Barnes juga menyarankan hanya satu sistem pendidikan dasar (sekolah dasar nasional) yang akan diselenggarakan. Laporan Fenn Wu menyarankan dan mendukung 'tiga bahasa' di mana Melayu, Cina dan Inggris. Bahasa harus didorong untuk menjadi bahasa pengantar.

Sebagai kompromi, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Pendidikan 1952, di mana promosi sistem sekolah nasional dengan pengenalan bahasa Inggris secara bertahap ke sekolah Bahasa Melayu dan Bahasa Melayu dan Inggris Sekolah Bahasa Tionghoa dan Tamil dan juga merekomendasikan pemeliharaan sekolah tipe nasional Inggris. Sistem pendidikan di Malaysia menganut sistem pendidikan dari Inggris, hal ini karena terbukti seluruh bekas jajahan Inggris selalu maju dalam bidang pendidikan. Berbeda halnya bekas jajahan Belanda dalam bidang pendidikan.

Negara Malaysia memiliki keinginan kuat untuk menjadikan pendidikannya itu *go international*. Buktinya hal itu dituangkan dalam rumusan misi utama Kementerian Pelajaran Malaysia, yang berbunyi, “*Mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia untuk merealisasikan potensi sepenuhnya setiap individu, di samping memenuhi aspirasi masyarakat Malaysia.*”²¹

Diantar hal yang menjadi keberhasilan pendidikan di Malaysia adalah;²²

- a. Belajar dari negeri yang telah maju
- b. Mengalokasikan dana yang cukup memadai
- c. Membuat perencanaan jangka panjang yang baik

Pemerintah Malaysia mempunyai perhatian yang besar dalam meningkatkan kualitas dan mutu perguruan tinggi demi memajukan pendidikan Islam. Tidak semua IPTA dan IPTS di Malaysia membuka *Islamic Studies*. Beberapa Perguruan tinggi yang membuka program *Islamic Studies* adalah: *Internasional Islamic University of Malaysia* (IIUM), *University of Malaya* (UM), *University Kebangsaan Malaysia* (UKM), *Univerisity Utara Malaysia* (UUM), *Univerisity Pendidikan Sultan Idris* (UPSI), *University Sains Malaysia* (USM), dan *Kolej University Islam Selangor* (KUIS).²³

²¹ Abd. Rachman Assegaf, *Internasionalisasi Pendidikan: Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-Negara Islam dan Barat*, h. 121.

²² Supriyoko, *Surat Kabar Harian “KEDAULATAN RAKYAT”*, Yogyakarta, Edisi 13 Desember 2000.

²³ MasterTarbiyah, “*Analisis Standar Mutu Pendidikan Indonesia dan Malaysia*,” *Manajemen Pendidikan Islam*, 14 Mei 2013, <https://mastertarbiyah1982.wordpress.com/2013/05/14/analisis-standar-mutu-pendidikan-indonesia-danMalaysia/> (23 Oktober 2014)

3. Analisis Kebijakan Pendidikan Islam dimalaysia

Jika dilihat dan dianalisis kebijakan pendidikan islam dimalaysia pada masa jepang dan inggris sesungguhnya system pendidikan dinegara tersebut memiliki dualisme dalam system kependidikan. Diantara hal itu yang menjadikannya dualism system adalah adanya kebijakan pada masa itu pendidikan bersifat sekuler dengan pelajaran-pelajaran modern dengan Bahasa inggrisnya dan satu lagi pelajaran pondok dengan pelajaran yang tidak ada Bahasa inggris dan kemodernannya. Kemudian, pada tahun 1970, pemerintah secara bertahap mengubah keduanya. Bahasa Melayu dan sekolah bahasa Inggris, yaitu kategori kedua dan ketiga, ke dalam sekolah nasional dan meninggalkan sekolah agama sendiri.

Pada tahun 1973, Divisi Pendidikan Agama (Bahagian Pelajaran Agama) didirikan dibentuk di lingkungan Departemen Pendidikan untuk mengkoordinasikan pendidikan Islam. 1983, namanya diubah menjadi Divisi Pendidikan Islam (Bahagian Pendidikan Islam).

Pada tahun 1995 direstrukturisasi menjadi Divisi Pendidikan Islam dan Moral (Bahagian Pendidikan Islam dan Moral). Sekarang telah dikembalikan ke Divisi Pendidikan Islam, dan tugasnya adalah mengelola kebijakan dan kurikulum pendidikan Islam. Kebijakan dan kurikulum bahasa Arab, perekrutan dan pelatihan dalam jabatan pendidikan Islam dan guru bahasa Arab, dan dakwah dan pelatihan kepemimpinan untuk staf dan siswa pendidikan Islam, dan untuk membantu dan meningkatkan standar kedua sekolah agama menengah nasional.

Sentralisasi administrasi dan kurikulum semua sekolah yang menawarkan beberapa jenis Islam pendidikan telah mendominasi upaya Kementerian Pendidikan di bidang pendidikan Islam formal. Kurikulum telah dirancang untuk menyelesaikan tujuan Pendidikan Filsafat Islam. Ada usaha terus menerus untuk mengakhiri dualisme antara pendidikan sekuler dan agama, seperti yang termanifestasi dalam perkawinan antara ilmu-ilmu Islam dan ilmu sekuler dalam kursus-kursus tingkat tersier. Kemudian, pada tahun 1970, pemerintah secara bertahap mengubah keduanya Bahasa Melayu dan sekolah bahasa Inggris, ke dalam sekolah nasional dan meninggalkan sekolah agama sendiri. Dua sistem ini terus tumbuh, menghasilkan Muslim yang dalam banyak kasus berkonflik satu sama lain karena pandangan dunia yang saling bertentangan yang diberitakan dalam sistem sekolah.

Ketika Mahathir Muhammad menjabat sebagai Menteri Pendidikan, kebijakan dan program keislaman di bidang pendidikan terlihat lebih awal mendapat perhatian dibanding bidang lainnya. Di awal karirnya sebagai Menteri Pendidikan Malaysia tahun 1974, Mahathir mengawali langkahnya dengan meninjau ulang sistem pengajaran agama Islam yang dipandang tidak efektif dan tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Segera setelah itu, ia mengadakan pengkajian kembali tentang pendidikan agama Islam dan sistem pengajarannya serta membentuk dewan penasihat untuk pendidikan agama Islam. Pembentukan dewan penasihat ini dimaksudkan untuk menggerakkan agar Islam menjadi relevan dengan kebutuhan modernisasi masyarakat muslim Malaysia dan agar gerakan ini dapat dilaksanakan secara koor-dinatif dan sistematis.²⁴

Pada tahun 1975, Kementerian Pendidikan mengeluarkan dana yang cukup besar untuk memperbaiki pelaksanaan pelatihan guru-guru agama Islam. Pada tahun berikutnya, pemerintah mengumumkan pengambil alihan atas sepuluh sekolah Islam terbaik di negara itu guna memperbaiki manajemen sekolah tersebut serta meningkatkan kinerja para guru dan pegawainya untuk dijadikan sebagai sekolah model. Pada tahun 1979, pemerintah mendeklarasikan pendirian Pusat Penelitian Islam Asia Tenggara. Pada tahun yang sama, pengetahuan agama Islam ditetapkan sebagai materi ujian di tingkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Setahun berikutnya pemerintah mendirikan yang pertama kali Maktab Perguruan Islam (Islamic Teacher's College) yang dari sana murid-murid berpotensi akan dikirim ke Mesir, Pakistan, dan Indonesia untuk melanjutkan studi mereka.²⁵

Adapun kebijakan lainnya terhadap pendidikan Islam di Malaysia antara lain:

- a. Sejak merdeka pada tahun 1957, ilmu pengetahuan agama Islam telah dijadikan sebagai kurikulum pendidikan nasional Malaysia.
- b. Pada tahun 1975, berbagai langkah penting untuk memperkuat pendidikan Islam ditempuh oleh Departemen Pendidikan.
- c. Pada tahun 1982, Perdana Menteri Mahathir Muhammad mengambil keputusan untuk menjalankan kebijakan penanaman nilai-nilai Islam di pemerintahan.

²⁴ Almas Akbar, "Pendidikan Malaysia (Kajian Perbandingan Pendidikan)," *Khazanah Keilmuan PAI*, <http://almasakbar45.blogspot.com/2012/04/bab-i-pendahuluan-latar-belakang.html> (24 Oktober 2014)

²⁵ Adi Radili, "Dinamika Perkembangan Islam di Asia Tenggara," *Blog ar-Sembilan*, <http://arsembilan.blogspot.com/2013/10/maklah-dinamika-perkembangan.html> (23 oktober 2014)

- d. Tahun 1983, Departemen Pendidikan menyatakan bahwa nilai-nilai moral akan diajarkan kepada pelajar non-muslim, sementara ilmu pengetahuan agama akan diajarkan kepada para pelajar muslim.²⁶

Hingga satu dekade lalu, pendidikan Islam tingkat dasar dan menengah Pendidikan di Malaysia terdiri dari lima jenis sekolah agama, yaitu.

- a. Federal Sekolah Agama (Sekolah Agama Persekutuan dan Sekolah Kebangsaan Agama)
- b. Sekolah Agama Pemerintah Negara Bagian
- c. Sekolah yang dijalankan oleh Majlis Agama Islam Negara
- d. Sekolah Keagamaan Rakyat
- e. Sekolah Agama Swasta (Sekolah Agama Swasta).

Dari jumlah tersebut, Sekolah Agama Rakyat (SAR) dan Sekolah Agama Swasta (SAS) dikelola secara mandiri tapi menerima penggunaan kurikulum nasional sehingga lulusannya dapat melanjutkan pendidikannya belajar di lembaga formal perguruan tinggi. Masalah abadi yang mengkhawatirkan. Para lulusan sekolah agama ini dulu sangat kekurangan tempat untuk melanjutkan pendidikan di Malaysia. Hanya tiga lembaga yang dikelola negara, yaitu. UM, UKM, dan IIUM menawarkan program studi studi Islam yang menerima mahasiswa berdasarkan spesialisasi tingkat menengah dalam mata pelajaran Islam itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Haji Abdullah. 1997, *Pemikiran Islam di Malaysia: Sejarah dan Aliran*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press
- Adi Radili, “*Dinamika Perkembangan Islam di Asia Tenggara*” Blog ar-Sembilan, <http://arsembilan.blogspot.com/2013/10/maklah-dinamika-perkembangan.html>
- Amir F. Hidayat, dan Abdurrasyid, 2006, *Ensiklopedi Negara-negara di Dunia*, Bandung: Pustaka Setia
- Ahmad Athori Hussain. 1993, *Dimensi Politik Melayu 1980-1990, Antara Kepentingan dan Wawasan Bangsa*, Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka
- Ajid Thorir. 2009, *Studi Kawasan Dunia Islam, Perspektif Etno-Linguistik dan GeoPolitik*, Jakarta: Rajawali Pers

²⁶ *ibid*

International Law Book Services, Malaysia Kita, Kuala Lumpur: Direct Art Company, 2005

Almas Akbar, “*Pendidikan Malaysia (Kajian Perbandingan Pendidikan*” Khazanah Keilmuan PAI, <http://almasakbar45.blogspot.com/2012/04/bab-i-pendahuluan-latar-belakang.html> (24 Oktober 2014)

Master Tarbiyah, “*Analisis Standar Mutu Pendidikan Indonesia dan Malaysia*” Manajemen Pendidikan Islam, 14 Mei 2013, <https://mastertarbiyah1982.wordpress.com>

Qasim A. Ibrahim dan Muhammad A. Saleh, *Buku Pintar Sejarah Islam: Jejak Langkah Peradaban Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, Cet. II /2013/05/14/analisis-standar-mutu-pendidikan-indonesia-dan Malaysia

Times Book International, Malaysia, Singapore & Kuala Lumpur: TBI, 2002

Muhammad Ismail Ahmad. 2004, *Sejarah Malaysia*, Selangor: Pustaka Mawar

Ghazali Mayudin. 2002, *Politik Malaysia: Perspektif, Teori, dan Praktik*, (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia

Yusuf Harun. 1991, *Tunku Idealisme Dalam Kenangan*, (Pulau Pinang: Yayasan Bumiputra